

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN

Titus Bayu Santoso, Dul Muid¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of corporate governance on tax avoidance. Corporate governance is proxied by the number of commissioners, the percentage of independent commissioner, compensation commissioners and the board of directors and stock ownership by the public. Tax avoidance is measured by the size of the book tax gap. This study used a quantitative research design and secondary data from companies listed in Indonesia Stock Exchange. By using purposive sampling in the observation period 2011-2013, obtained 60 observations. Data were analyzed using ordinary least squares regression models.

Regression results show that the amount of salary compensation commissioners and board of directors have a positive and significant impact on tax avoidance. While the number of commissioners, the percentage of independent commissioners, and the public shareholding does not have a significant effect on tax avoidance. The results of this study indicate that some corporate governance mechanisms in Indonesia has not been effective according to its function for shareholders.

Keywords: tax avoidance, corporate governance, board of commissioners, independent commissioners,

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit.

Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain melakukan penghindaran pajak, manajemen pajak juga dilakukan melalui penggelapan pajak (tax evasion) dimana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. (Faisal Reza, 2012)

Manajemen pajak perlu diawasi agar usaha-usaha yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. Pembentukan corporate governance dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan yang salah satunya menyangkut perpajakan perusahaan. Karakteristik corporate governance sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011).

¹ Corresponding author

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan hubungan antara beberapa mekanisme kontrol corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan. (Sabli dan Noor, 2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak. Penelitian Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa dewan komisaris sebagai prinsipal atau pemilik bertugas untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Maria Meilinda (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Bhagat dan Black (1999). Sedangkan Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak.

Komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris (Mangel dan Singh, 1993) Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah komisaris independen semakin banyak (Bernad, 2011)

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa manajemen pajak merupakan aktivitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan manfaat kepada pemegang saham (Graham dan Tucker, 2006; Desai dan Dharmapala, 2006). Phillips (2003) berpendapat bahwa pemberian kompensasi berperan memotivasi kinerja manajer dalam meminimalisasi tingkat pajak efektif perusahaan. Desai dan Dharmapala (2006) meneliti pengaruh tax sheltering dan pemberian kompensasi yang tinggi untuk para manajer.

Adanya kepentingan diantara para pemegang saham dalam perusahaan tampaknya mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak perusahaan (Core et al., 1999). Bauwhede, et al. (2000), yang menemukan bahwa kepemilikan publik berperan sebagai penghambat manajemen laba dalam mengurangi penghasilan. Manajemen laba yang didukung oleh publik adalah yang menaikkan penghasilan, agar memenuhi harapan pasar modal dan meningkatkan harga saham. Maka kepemilikan publik akan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan.

Minnick dan Noga (2010) mengatakan bahwa menguji hubungan antara governance dengan manajemen pajak merupakan hal yang menarik karena 2 alasan, yaitu:

1. Manajemen pajak atau perencanaan pajak dapat sangat kompleks dan memungkinkan adanya kesempatan dalam pengelolaan, sehingga mengerti peran corporate governance dalam manajemen pajak menjadi hal yang penting.

2. Manajemen pajak memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan mungkin tidak memberikan dampak secara langsung kepada kinerja perusahaan, sehingga dengan mengerti bagaimana governance berhubungan dengan manajemen pajak dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana governance berfungsi dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Penelitian – penelitian yang sudah ada tentang pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak kebanyakan hanya meneliti mekanisme kontrol internal. Sedangkan penelitian dengan melibatkan mekanisme kontrol eksternal seperti kepemilikan masyarakat belum banyak diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah dewan komisaris, presentase komisaris independen, kompensasi eksekutif dan kepemilikan saham oleh publik terhadap penghindaran pajak perusahaan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan mekanisme kontrol terhadap pengelolaan perusahaan. Corporate governance akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan strategis perusahaan. Usaha menghindari beban pajak perusahaan melalui manajemen pajak merupakan salah satu keputusan strategis perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh corporate governance.

Penelitian ini menguji pengaruh mekanisme-mekanisme corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan. mekanisme corporate governance tersebut ada 2 yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal terdiri dari jumlah dewan komisaris, presentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi eksekutif. Sedangkan mekanisme eksternal corporate governance berupa kepemilikan saham oleh publik

Jumlah Dewan Komisaris dan Penghindaran Pajak

Dalam mengelola perusahaan berdasarkan prinsip good governance, peran dewan komisaris sangat diperlukan. Mulyadi (2002) menyebutkan bahwa dewan komisaris adalah wakil dari para pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen.

Coles et al. (2008) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak. Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan akan semakin banyak membutuhkan penasihat.

Dewan komisaris merupakan perwakilan dari para pemegang saham. Sehingga diharapkan dewan komisaris dapat memaksimalkan laba dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Diharapkan dengan semakin banyaknya dewan komisaris akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Persentase Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak

Teori keagenan menyatakan bahwa bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Premis dari teori keagenan adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam penelitian Minnick dan Noga (2010) menjelaskan bahwa adanya nilai positif terhadap nilai perusahaan setelah pajak, yang kemudian meningkatkan kekayaan pemegang saham serta memberikan pendorong yang signifikan dari kinerja *bottom line*.

Komisaris independen memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengontrol dan menghadapi jaring insentif yang kompleks, yang berasal secara langsung dari tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperbesar oleh posisi equity mereka. Oleh karena itu, komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris (Mangel dan Singh, 1993).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komisaris independen akan memaksimalkan kinerja dewan komisaris dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap usaha memaksimalkan laba perusahaan, maka hipotesis yang diajukan :

H2 : Presentase komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan Penghindaran Pajak

Penelitian sebelumnya menemukan beragam pengaruh dari kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Rego dan Wilson (2008), Minnick dan Noga (2010), Armstrong, *et al.* (2012), dan Rego dan Wilson (2012) menemukan adanya hubungan positif antara kompensasi dengan penghindaran pajak perusahaan.

Minnick dan Noga (2010) dan Rego dan Wilson (2012) menggunakan ukuran kompensasi saham dan opsi saham yang diberikan kepada eksekutif, sedangkan Rego dan Wilson (2008) dan Armstrong, *et al.* (2012) menggunakan ukuran total kompensasi, yang terdiri atas jumlah gaji, bonus, pembayaran insentif jangka panjang, saham, dan opsi saham, dan jumlah lain yang diberikan kepada eksekutif. Dengan adanya komponen saham dan opsi saham, manajer akan memiliki motivasi serupa dengan pemegang saham yang lain. Manajer akan menggunakan waktu dan upaya untuk melakukan penghindaran pajak, demi memperbesar kekayaan perusahaan.

Sehingga berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Kepemilikan Publik dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham perusahaan yang nilainya masing-masing kurang dari 5% dan tidak terafiliasi dengan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa pemegang saham publik merupakan pemegang saham dengan kekuatan minoritas dalam perusahaan. Adanya kepentingan diantara para pemegang saham dalam perusahaan tampaknya mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak perusahaan (Core *et al.*, 1999). Bauwhede, *et al.* (2000), yang menemukan bahwa kepemilikan publik berperan sebagai penghambat manajemen laba dalam mengurangi penghasilan. Manajemen laba yang didukung oleh publik adalah yang menaikkan penghasilan, agar memenuhi harapan pasar modal dan meningkatkan harga saham. Maka kepemilikan publik akan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan.

Sehingga berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan book tax gap (BTG), selisih antara laba sebelum pajak yang dengan laba kena pajak perusahaan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan yang didapat dari BEI. Mengikuti penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Desai Dharmapala(2006) dan Manzon Plesko (2002). Variabel independen yang akan diteliti antara lain jumlah dewan komisaris, variabel ini diukur secara numeral, yaitu dilihat jumlah nominal dari anggota yang tergabung dalam dewan komisaris sesuai penelitian Subramaniam *et al* (2009). Persentase komisaris independen diukur menggunakan skala rasio, yaitu persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010). jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi dan kepemilikan public mengikuti Core, *et al.* (1999), Core, *et al.* (2008), Rego dan Wilson (2008), Gaertner (2011), dan Armstrong *et al.* (2012) yang mengukur kompensasi eksekutif dengan menggunakan total kompensasi diterima eksekutif selama satu tahun. Variabel kepemilikan saham publik diukur mengikuti Handayani (2007) yang mengukur kepemilikan saham oleh publik dengan menggunakan persentase yaitu kepemilikan saham publik dibagi total saham beredar. sedangkan variabel kontrol yang akan diteliti adalah ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan tingkat hutang perusahaan.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2013. Sampel dipilih berdasarkan metode purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan perusahaan manufaktur
2. Terdapat laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan selama 3 tahun berturut-turut (tahun 2011-2013) yang dapat diakses dari situs BEI (www.idx.co.id) atau dari situs perusahaan
3. Laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Pemilihan kriteria ini adalah karena penggunaan mata uang yang berbeda dapat menimbulkan perbedaan kurs meskipun telah dilakukan konversi.
4. Tahun buku berakhir 31 desember. Hal ini untuk menjaga keseragaman terhadap sampel dan analisisnya.
5. Laporan keuangan yang memiliki data yang dibutuhkan selama 3 tahun (2011-2013) yaitu:
 1. Perhitungan rekonsiliasi fiskal
 2. Jumlah dewan komisaris
 3. Jumlah komisaris independen
 4. Jumlah kompensasi yang diterima dewan komisaris dan direksi
 5. Struktur pemegang saham
6. Perusahaan tidak mengalami BTG negatif

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan model regresi ordinary least square (OLS) untuk menguji hipotesis, mengikuti Annisa (2011), Zhou (2011), dan Sabli dan Noor (2012). Model penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$BTG = \beta_0 + \beta_1 BOARD + \beta_2 INDEP + \beta_3 LKOMP + \beta_4 PUB + \beta_5 LSIZE + \beta_6 ROA + \beta_7 DEBT + e$$

Dimana :

Variabel dependen:

BTG : Penghindaran pajak berdasarkan book tax gap dihitung dari selisih laba perusahaan sebelum pajak dan laba kena pajak perusahaan

Variabel independen :

BOARD : jumlah dewan komisaris

INDEP : presentase komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris

LKOMP : Logaritma Total kompensasi selama setahun yang diterima direksi dan dewan direksi

PUB : presentase kepemilikan masyarakat (publik)

Variabel kontrol :

LSIZE : merupakan logaritma total asset perusahaan

ROA : laba bersih dibagi total aset

DEBT : total hutang dibagi ekuitas

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013. Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI sebanyak 136 perusahaan (sumber: IDX-factbook 2013). Perusahaan yang tersedia selama tahun penelitian (2011-2013) dan laporan tahunannya dapat ditemukan di IDX maupun website

masing-masing perusahaan terdapat 100 perusahaan. proses seleksi sample berdasarkan purposive sampling ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 1
Jumlah Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah perusahaan setiap tahun selama 2011-2013
1	Jumlah perusahaan manufaktur	136
2	Perusahaan Laporan Tahunan 2011-2013 tidak lengkap	(36)
3	Laporan keuangan tidak disajikan dalam rupiah	(18)
4	Laporan keuangan tidak mengungkapkan kompensasi Dewan komisaris dan dewan direksi	(4)
5	Perusahaan dengan BTG negatif	(58)
Total perusahaan sampel		20

Sumber: Data sekunder yang telah diolah

Penelitian ini menggunakan model regresi *Ordinary least square*. Dari pemilihan sampel didapat 20 perusahaan setiap tahun selama 2011-2013. Sehingga jumlah observasi (n) penelitian ini adalah 60 observasi.

Variabel dependen adalah penghindaran pajak yang diukur dengan proksi BTG. Variabel independen adalah tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan BOARD, INDEP, LKOMP dan PUB. Variabel kontrol yaitu LSIZE, ROA, dan DEBT.

Analisis Data

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik untuk variabel BTG, BOARD, INDEP, LKOMP, PUB, LSIZE, ROA, dan DEBT disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2
Tabel Hasil Statistik Deskriptif

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Variabel Dependen				
<i>Penghindaran Pajak</i>				
BTG	279034863	9840000000000	492626805222,466	1844741147403,91
Variabel Independen				
<i>Tata Kelola Perusahaan</i>				
BOARD	3	12	4,73	2,299
INDEP	,2000	,8000	,404208	,1260407
LG10KOMP	8,72	11,99	10,0240	,69858
PUB	,0400	,7029	,261252	,1619006
Variabel Kontrol				
<i>Karakteristik Perusahaan</i>				
LG10SIZE	8,88	14,19	12,1904	,90789
ROA	-,0700	6,5545	,234059	,8405293
DER	-30,5981	27,9771	,554401	6,2163015
Valid N (listwise)				

Sumber: data sekunder yang diolah.

Variabel BTG menjadi proksi untuk penghindaran pajak perusahaan. Semakin besar BTG maka semakin besar penghindaran pajaknya. Variabel BTG dihitung dari perbedaan antara laba sebelum pajak perusahaan dengan laba fiskal. Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 279034863 dan nilai maksimum sebesar 9840000000000. Nilai rata-rata(Mean) yaitu 492626805222,466 dan standar deviasi 1844741147403,91.

Variabel BOARD menggambarkan jumlah dewan komisaris. Variabel ini memiliki nilai minimum 3 dan nilai maksimum 12. Nilai rata-rata (mean) 4,73 dan Standar deviasi yaitu 2,299

Variabel INDEP merupakan presentase dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. variabel ini memiliki nilai minimum 0,2 dan nilai maksimum 0,8. Nilai mean sebesar 0,404208 dan standar deviasi 0,1260407.

Variabel LKOMP merupakan logaritma dari total kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris termasuk gaji dan bonus. Variabel ini memiliki nilai minimum 8,72 dan nilai maksimum 11,99. Nilai mean 10,0240 dan standar deviasi 0,69858.

Variabel PUB merupakan presentase dari kepemilikan saham dibawah 5% yang dimiliki oleh masyarakat. Variabel ini menunjukkan nilai minimum 0,0400 dan nilai maksimum 0,7029. Nilai mean 0,261252 dan nilai standar deviasinya 0,1619006

Variabel LSize merupakan logaritma 10 dari total aset perusahaan, yang menggambarkan ukuran perusahaan. Nilai minimumnya 8,88 sedangkan nilai maksimum variabel 14,19. Nilai mean yang didapat adalah 12,1904 sedangkan standar deviasinya 0,90789

Variabel ROA merupakan laba bersih dibagi total aset. Variabel ini menggambarkan kemampuan kinerja laba bersih perusahaan. Variabel ini memiliki nilai minimum -,0700 dan nilai maksimum 6,5545. Nilai mean dari variabel ini adalah 0,234059 sedangkan standar deviasinya adalah 0,8405293.

Variabel DER merupakan total hutang dibagi total ekuitas perusahaan. variabel ini menggambarkan kemampuan perusahaan membayar hutang perusahaan dengan menggunakan ekuitas yang ada. Nilai minimum variabel ini adalah -30,5981 dan nilai maksimumnya adalah 27,9771. Nilai mean sebesar 0,554401 sedangkan standar deviasinya 6,2163015.

Hasil Uji Hipotesis

Untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak, dilakukan regresi linear.

Tabel 3
Tabel Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,810 ^a	,656	,601	3,89443E5	1,479	

a. Predictors: (Constant), LAGS(SQBTG,1), ROA, PUB, DER, INDEP, BOARD, LG10KOMP, LG10SIZE

b. Dependent Variable: SQBTG

sumber: data sekunder yang diolah

Tabel 3 menyajikan hasil uji determinasi. Berdasarkan nilai *adjusted R²* pada tabel 4.3 diketahui bahwa 60,1% variasi variabel dependen (BTG) dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen (BOARD, INDEP,PUB, LG10KOMP) dan 3 variabel kontrol (LG10SIZE,ROA,DER). Sedangkan sisanya yaitu 39,9% dijelaskan oleh sebab lain diluar model.

Untuk membuktikan signifikansi keseluruhan model, uji statistik F dilakukan dengan *Analysis of Variance* (ANOVA). Hasil uji statistik F ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4
Tabel hasil Uji Statistik F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,447E13	8	1,808E12	11,923	,000 ^a
	Residual	7,583E12	50	1,517E11		
	Total	2,205E13	58			

a. Predictors: (Constant), LAGS(SQBTG,1), ROA, PUB, DER, INDEP, BOARD, LG10KOMP, LG10SIZE

b. Dependent Variable: SQBTG

sumber: data sekunder yang diolah

Dari tabel 4, nilai F statistik adalah 11,923. Nilai F regresi signifikan pada tingkat 1%, 5%, dan 10%, mengindikasikan bahwa paling tidak satu variabel penjelas dalam model regresi memiliki pengaruh ada variabel dependen. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penghindaran pajak yang diprosikan dengan BTG. Variabel BOARD, INDEP, PUB, LKOMP, LSIZE, ROA, dan DER secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Untuk menguji hipotesis maka dilakukan regresi dengan metode ordinary least square. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Tabel Hasil Analisis Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-4384155,491	1200452,305		-3,652	,001
BOARD	24677,747	37238,775	,092	,663	,511
INDEP	-252487,347	475371,017	-,052	-,531	,598
PUB	585313,837	336762,422	,153	1,738	,088
ROA	66577,501	79312,823	,092	,839	,405
DER	1927,302	8223,173	,020	,234	,816
LG10KOMP	352060,945	127866,285	,399	2,753	,008
LG10SIZE	73623,582	98369,211	,109	,748	,458
LAGS(SQBTG,1)	,334	,104	,334	3,215	,002

a. Dependent Variable: SQBTG

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa variabel BOARD memiliki nilai probabilitas sebesar 24677,747 dengan nilai t hitung 0,663 dan signifikan pada 0,511. Hal ini menunjukkan bahwa variabel BOARD tidak signifikan. Variabel INDEP memiliki nilai probabilitas -252487,347 nilai t hitung -0,531 dan signifikansi 0,598. Hal ini menunjukkan bahwa variabel INDEP memiliki hubungan tidak signifikan. Variabel PUB memiliki nilai probabilitas 585313,837 nilai t hitung 1,738 dan tingkat signifikansi 0,088. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PUB memiliki pengaruh signifikan. Variabel LKOMP memiliki probabilitas 352060,945 nilai t hitung 2,753 dan signifikansi 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa variabel LKOMP memiliki pengaruh positif terhadap BTG dan pengaruhnya signifikan.

Variabel LSIZE memiliki nilai probabilitas 73623,582 nilai t hitung 0,748 dan tingkat signifikansi 0,458. Hal ini menunjukkan bahwa variabel LSIZE memiliki pengaruh positif terhadap BTG namun tidak signifikan. Variabel ROA memiliki nilai probabilitas 66577,501 nilai t hitung 0,839 dan tingkat signifikansi 0,405. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA memiliki pengaruh positif terhadap BTG namun tidak

signifikan. Variabel DER memiliki nilai probabilitas 1927,302 nilai t hitung 0,234 dan tingkat signifikansi 0,816. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DER memiliki pengaruh positif terhadap BTG namun tidak signifikan

Interpretasi Hasil

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian pengaruh mekanisme corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian uji statistik regresi linear sederhana menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis. Hasil tersebut juga bertentangan dengan penelitian Bhagat dan Black (1999), Minnick dan Noga (2010) yang menyatakan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak jumlah dewan komisaris tidak mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian terhadap pengaruh presentase komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dalam dewan komisari berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan namun hubungannya tidak signifikan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis. Hasil penelitian berbeda dengan penelitian (Jensen dan Meckling, 1976) dan (Mangel dan Singh, 1993). Penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen kurang berperan mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan eksekutif dalam penghindaran pajak.

Kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan pengaruh tersebut signifikan. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dari Rego dan Wilson (2008), Minnick dan Noga (2010), Armstrong, *et al.* (2012) yang menemukan hubungan positif antara jumlah kompensasi terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi memicu kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa presentase kepemilikan saham publik memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak namun pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini berbeda dengan hipotesis. Hal ini disebabkan karena pemegang saham publik kurang dapat memberikan kontrol terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Hasil uji statistik regresi linear sederhana menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak signifikan mengontrol pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan usaha penghindaran pajak dilakukan baik pada perusahaan kecil maupun besar di Indonesia.

Kinerja perusahaan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kinerja baik di Indonesia, tidak memiliki sistem tata kelola yang efektif sehingga dapat terjadi penghindaran pajak.

Tingkat hutang perusahaan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa hutang perusahaan tidak memicu kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Penelitian ini menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak, dan menemukan beberapa hasil yang dapat memperluas kajian mengenai pengaruh ini. Dengan menggunakan 20 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2011 sampai 2013, dan dari pengujian hipotesis dan pembahasan yang dilakukan, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa peran dewan komisaris tidak efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia.
2. Proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan peran komisaris independen yang tidak signifikan dalam pengambilan keputusan pajak strategis perusahaan di Indonesia.
3. Kompensasi eksekutif memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Sistem bonus pada perusahaan-perusahaan tersebut memotivasi manajer dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan.
4. Kepemilikan saham oleh publik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini disebabkan pemegang saham publik yang tidak memiliki kontrol efektif dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan dan kurangnya informasi yang didapat terkait penghindaran pajak.
5. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dapat disebabkan usaha penghindaran pajak dilakukan baik pada perusahaan kecil maupun besar di Indonesia.
6. Kinerja perusahaan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kinerja baik di Indonesia, tidak memiliki sistem tata kelola yang efektif sehingga dapat terjadi penghindaran pajak .
7. Tingkat hutang perusahaan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa hutang perusahaan tidak memicu kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, yaitu bahwa sampel penelitian ini hanya menggunakan sampel industri manufaktur sehingga jumlah observasi masih sedikit. Kedua, penelitian hanya menggunakan variabel-variabel tertentu untuk menjelaskan mekanisme corporate governance.

Atas dasar keterbatasan tersebut, maka saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan variabel-variabel lain corporate governance. Penelitian juga diharapkan menggunakan lebih banyak industri sebagai sampel penelitian.

REFERENSI

- Armstrong, Christopher S., Jennifer L. Blouin, and David F. Larcker. 2012. The Incentives for Tax Planning. *Journal of Accounting and Economics* 53: 391-411.
- Bernad H.2011. "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar di BEI)". Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- Bhagat, S. dan Black, B. 1999. "The uncertain relationship between board composition and firm performance". *Business Lawyer*, Vol. 55, h.921-963.
- Core, J.E., R.W. Holthausen, dan D.F. Larcker. 1999. "*Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm performance.*" *Journal of Financial Economics* 51 (1999), h. 371-406. Diakses tanggal 14 Oktober 2012, dari www.sciencedirect.com.
- Ghozali, Imam. 2006. "*Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS*". BP Undip : Semarang

- Graham, John R. and Alan L. Tucker. 2006. "*Tax Shelter and Corporate Debt Policy*". *Journal of Financial Economics*, Vol. 81 , No.3, h. 563-594
- Irawan, Hendra Putra dan Aria Farahmita. 2012. "Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan." *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. 1976. "*Theory of Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure*". *Journal of Financial Economics*, Vol.3, h. 305-360.
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. www.ssrn.com
- Lumbantoruan , Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo.
- Mangel, R., and Singh, H. 1993. "*Ownership Structure, Board Relationships and CEO Compensation in Large U.S. Corporations*". *Accounting and Business Research*, Vol.23, h. 339-350.
- Meilinda, Maria dan Nur Cahyonowati. 2013. "Pengaruh corporate governance terhadap manajemen pajak". *Diponegoro Journal of accounting*, Vol 2, No. 3, h. 1.
- Minnick, Kristina dan Tracy Noga. 2010. "*Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?*". *Journal of Corporate Finance*, Vol. 16, h. 703-718.
- Phillips, John D. 2003. "*Corporate Tax-Planning Effectiveness: The Role of Compensation-Based Incentives*". *The Accounting Review*. Vol.78, No. 3, h.847-874
- Pohan, Anwar .2011. *Optimizing Corporate Tax Management, Kajian Perpajakan dan Tax Planning Terkini*. Edisi 1. Jakarta: Bumi Aksara
- Reza, Faisal. 2012. "Pengaruh Dewan Komisaris Dan Komite Auditor terhadap Penghindaran Pajak" . Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Sabli, Nurshamimi dan Noor Md Rohaya. 2012. *Tax Planning and Corporate Governance*. *Proceeding International Conference on Business and Economic Research*.
- Shleifer, A., dan Vishney, R. 1986. "*Large Shareholders and Corporate Control*". *Journal of Political Economy*. Vol.94,h. 461-488.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 1. Jakarta : Salemba

